

Implementasi Sistem Kebijakan Zonasi Pada SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur

Aisyah Safira Maharani

Universitas 17 Agustus 1945

Anggraeny Puspaningtyas

Universitas 17 Agustus 1945

Korespondensi : safiraaisyah653@gmail.com

Abstract. *To improve the quality of education in Indonesia, school reform includes zoning. Minister of Education and Culture Regulation Number 44 of 2019 concerning Admission of New Students to Kindergartens, Elementary Schools, Middle Schools, High Schools and Vocational High Schools is part of the government's efforts to evaluate education. This study aims to explain how the implementation of the Zoning Policy for New Student Admissions is carried out as an effort to check the quality of education in state elementary schools and elementary schools in Genteng District, Surabaya City. The author uses a qualitative consideration literature study method. According to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2013: 99), six variables are used as the focus of research: policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, tendencies or propensities of implementers, communication between organizations and activities, and the economic, social, and politics. Technical data used. The results show that those implementing the Zoning Policy for Admission of New Students as an Effort to Study the Quality of Education (Primary School and Junior High School Level Studies in Genteng District, Surabaya City) have followed the expected policy. Although zoning policies are necessary, there are still some problems. Social, political and economic resource and environmental variables are still difficult to apply.*

Keywords: Policy, Zoning, Implementation

Abstract. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, reformasi sekolah termasuk zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan Kebijakan Zonasi Penerimaan oleh Mahasiswa Baru dilakukan sebagai upaya untuk memeriksa kualitas pendidikan di sekolah dasar negeri dan SD di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Penulis menggunakan metode studi literatur pertimbangan kualitatif. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99), enam variabel digunakan sebagai fokus penelitian: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Data teknis digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa bahwan yang menerapkan Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Kajian Mutu Pendidikan (Studi Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Genteng Kota Surabaya) telah mengikuti kebijakan yang diharapkan. Meskipun kebijakan zonasi diperlukan, masih ada beberapa masalah. Variabel sumber daya dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi masih sulit untuk diterapkan.

Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, Implementasi

PENDAHULUAN

Dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi adalah kriteria utama. Ini didasarkan pada jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dan satuan pendidikan, bukannya Nilai Ujian Nasional seperti sebelumnya. Pemerintah telah memulai zonasi secara

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 01, 2023

* Aisyah Safira Maharani safiraaisyah653@gmail.com

bertahap sejak tahun 2016. Pada tahun 2017, zonasi pertama kali diterapkan untuk sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi untuk sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Dengan melakukan ini, pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeragam.

Sistem zonasi adalah syarat utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seperti sebelumnya, ini didasarkan pada Nilai Ujian Nasional, bukan jarak antara tempat tinggal calon siswa dan satuan pendidikan. Sejak 2016, pemerintah telah memulai zonasi secara bertahap.

Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pertama kali dizonasi pada tahun 2017.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan melakukan ini, pemerintah bermaksud melakukan reformasi sekolah yang konsisten.

Pada tahun ajaran baru 2018/2019, kebijakan zonasi diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Kota Surabaya, Jawa Timur. Banyak sekolah negeri dan swasta telah menggunakan sistem zonasi, termasuk sekolah swasta seperti SD Swasta Aisyah Kota Surabaya. Sejauh ini, penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan karena beberapa orang tua murid percaya bahwa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan pendidikan. Orang tua dan calon siswa juga mengalami kebingungan atau kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zonasi terkadang tidak memenuhi kebutuhan anak, kuota yang terbatas, dan sekolah yang diterima anak tidak memenuhi tujuan Untuk zona, yang dibentuk berdasarkan sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru, peserta didik baru dapat memilih empat SD dalam zona dan satu SD di luar zona. Begitu juga, sistem akan memilih satu sekolah berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SDS Aisyah Kota Surabaya ?
2. Mengapa Sistem Zonasi Sangat Penting Diterapkan Pada SDS Aisyah Kota Surabaya ?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam ranah kualitatif, pada metode penelitian deskriptif dan kemudian kualitatif dalam penyusunan ini. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu masalah sehingga data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang keadaan objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dan mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambaran, dan bukan angka (Lexi J Maleong, 2001). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari subjek atau pelaku penelitian (Bongdan dan Taylor, 2001).

1. Populasi

Dalam suatu penelitian, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian dan tempat untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Objektif penelitian dapat berupa benda, individu, peristiwa, gejala, atau hubungan antara mereka.

Menurut B Sandjaja dan Albertus Heryanto (2006) Sehubungan dengan pemahaman ini, populasi dan penelitian ini terdiri dari Kepala UPT Dapodik, Kepala TU Dapodik, Kepala Sekolah SD Aisyah Surabaya, Orang Tua dan Peserta Didik SD Negeri Aisyah Surabaya.

2. Sampel

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Meskipun penggunaan sampel pada dasarnya dimaksudkan untuk mengambil sebagian populasi, hasil penelitian akhirnya mencakup seluruh populasi. Menurut Sugiyono (2009), baik jumlah populasi maupun karakteristiknya terdiri dari sampel. Penulis menggunakan teknik sampling tujuan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan grand theory implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai jembatan proses berjalannya observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi penunjang mengenai sistem zonasi di tingkat SMPN di Surabaya. merupakan bagian dari proses berjalannya penerimaan siswa baru, yang mencakup permasalahan infrastruktur dan

komunikasi yang kurang stabil. Sampel yang didapat oleh peneliti bermula dari SD Aisyah Surabaya di Kecamatan Genteng, Jawa Timur. Pada sekolah tersebut sedang mengalami problem karena tidak adanya bangunan sekolah di lingkungan yang padat penduduk, yang berdampak signifikan pada penerapan sistem zonasi saat menerima siswa baru.

Teknik pengambilan berita dilakukan menggunakan pencarian artikel-artikel terkait serta berita yang berkembang di sosial media dan tambahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait kurangnya Bangunan sekolah di SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur yang cukup memberi dampak terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terdapat di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil yang didapat dari artikel-artikel serta berita yang beredar di media sosial tersebut maka permasalahan belum meratanya peserta didik akibat implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terkait Terbatasnya sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang di beberapa wilayah yang ada di kota Surabaya khususnya di daerah-daerah yang padat penduduk (Setiawan & Rahaju, 2021).

Sistem zonasi dalam pengalokasian sekolah memang penting untuk memastikan distribusi yang adil dan merata bagi siswa di berbagai daerah. Jika SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur di Surabaya menghadapi masalah kurangnya sekolah dan hal ini menghambat penerapan sistem zonasi, beberapa langkah berikut dapat diambil untuk mengatasi situasi tersebut (Hariyati et al., 2019). Identifikasi kebutuhan: Lakukan penelitian dan survei untuk mengidentifikasi jumlah siswa yang membutuhkan akses ke sekolah di SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur. Perlu juga dipertimbangkan pertumbuhan populasi dan kebutuhan pendidikan jangka panjang. Pembangunan sekolah baru: Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah daerah atau instansi terkait dapat merencanakan pembangunan sekolah baru di SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur. Hal ini akan meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pemulihan dan perluasan sekolah yang ada: Jika terdapat sekolah yang sudah ada di daerah tersebut namun kurang memadai, pemulihan dan perluasan sekolah tersebut dapat dilakukan. Perbaikan infrastruktur, penambahan ruang kelas, dan fasilitas lainnya akan meningkatkan kapasitas sekolah. Kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta: Melibatkan lembaga pendidikan swasta dapat menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di SD Aisyah

Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur. Kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pilihan sekolah tambahan bagi siswa. Dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat setempat, solusi yang diimplementasikan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Prioritaskan pengalokasian sumber daya: Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan sekolah-sekolah yang ada dapat berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di SD Aisyah Surabaya Kecamatan Genteng Jawa Timur. Peningkatan kualitas guru: Selain membangun dan memperluas sekolah, penting juga untuk meningkatkan kualitas guru. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di daerah tersebut akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang disediakan.

Fokus diskusi adalah evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Surabaya, berdasarkan fenomena yang ditampilkan dalam berbagai media dan literatur yang dapat diakses oleh penulis, serta hasil penelusuran yang didasarkan pada studi kasus dan studi literatur yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Sistem zonasi memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah sesuai domisili terdekat mereka. Menurut Bab IV Pasal 16 Permendikbud, ayat (3) menyatakan bahwa radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah daya tampung rombongan belajar di masing-masing sekolah. Ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah daerah melibatkan musyawarah dengan komunitas lokal untuk menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada peserta didik jenjang SD di kota Surabaya, dampak positif dari sistem zonasi tersebut hanya dirasakan oleh sedikit masyarakat (Mulyasari, 2020). Siswa yang tinggal dekat dengan sekolah negeri akan lebih mudah masuk, meskipun mereka memiliki nilai ujian yang lebih rendah. Sebaliknya, siswa yang tinggal jauh dari sekolah hanya memiliki peluang kecil untuk masuk. Namun, di jenjang sekolah dasar di kota Surabaya, ada sistem zonasi jalur khusus untuk siswa yang berprestasi akademik yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mengikuti tes potensi akademik (TPA). Menurut evaluasi kebijakan kriteria kecukupan, sistem zonasi PPDB di kota Surabaya dianggap sesuai karena memberikan manfaat bagi siswa yang memiliki potensi rendah untuk masuk sekolah negeri dan memberikan jarak tempuh dekat bagi siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik. Sistem zonasi memungkinkan semua siswa di Indonesia

untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama di seluruh negeri tanpa membedakan kemampuan akademik. kuota harus disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan sekolah agar semuanya berhasil.

KESIMPULAN

Sistem zonasi yang kurang baik terkait kurangnya bangunan di daerah padat penduduk dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah: Kepadatan penduduk yang tinggi tanpa cukup bangunan dapat mengakibatkan kekurangan tempat tinggal bagi penduduk. Ini dapat menyebabkan masalah perumahan, seperti harga tinggi atau sulitnya menemukan tempat tinggal yang layak. Kekurangan bangunan di daerah padat penduduk juga dapat menghambat perkembangan ekonomi lokal. Kurangnya ruang usaha atau kantor yang memadai dapat menghalangi peluang bisnis baru dan investasi di daerah tersebut. Selain itu, sistem zonasi yang kurang baik juga dapat berdampak negatif terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Kurangnya bangunan seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya dapat membebani pelayanan yang ada, mengakibatkan over konsentrasi penduduk pada fasilitas yang tersedia.

Untuk meningkatkan sistem zonasi dan mengatasi kurangnya bangunan di daerah padat penduduk, beberapa saran yang dapat diambil adalah: Perencanaan yang lebih baik: Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan perencanaan yang lebih baik dalam menentukan zonasi dan alokasi lahan. Perlu dipertimbangkan kebutuhan perumahan, tempat usaha, dan fasilitas umum untuk memastikan ketersediaan yang memadai di daerah padat penduduk. insentif bagi pengembang: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pengembang untuk membangun di daerah padat penduduk yang kekurangan bangunan. Insentif ini dapat berupa kemudahan perizinan, pembebasan pajak, atau bantuan keuangan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat.

Pembangunan Berkelanjutan: Untuk mengatasi kekurangan bangunan, prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting. Bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan harus diprioritaskan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan cara memanfaatkan lahan dengan bijak. Keterlibatan masyarakat: Solusi yang lebih baik dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Dalam pembuatan kebijakan zonasi dan pembangunan, masyarakat setempat harus didengar dan dipertimbangkan. Kolaborasi

antar sektor: Untuk mengatasi kurangnya bangunan di daerah padat penduduk, kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting. Sumber daya dapat digabungkan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang diperlukan melalui kerja sama yang kuat.

REFERENSI

Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo, Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118.

<https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>

Anggraeni, A., Astuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SD di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.

Hariyati, Nunuk, & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SD Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.

Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat SD Di Kota Surabaya. *Publika*, 491–502.

File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx, 21(1), 1–9.

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi.

Jurnal HAM, 12(2), 179. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192> Mulyasari, A.(2020).Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SD Swasta Di Kota Surabaya(Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur)

Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

Sedarmayanti (2004) Good Governance(Kepemerintahan Yang Baik),Mandar Maju Ula, D. M. And Lestari, I. (2019) 'Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat', Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019.